

**ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF THE LOCAL
GOVERNMENTS IN JAWA YEAR 2011—2015**

Sukeksi Hastaningrum
Magister of Accounting Program
Faculty of Economics and Business
Universitas Gadjah Mada
Email: sukeksih@gmail.com

ABSTRACT

This research is to comprehensively analyze the financial conditions of the local governments in Jawa from 2011 to 2015. Seven dimensions were used to measure the financial conditions, namely long-term solvency, short-term solvency, budgetary solvency, operational solvency, financial flexibility, service-level solvency, and financial independence. As many as 29 indicators have formed the dimensions of the financial conditions. These dimensions were then merged to make a financial condition composite index (FCI) serving as the basis of ranking and categorization. After the results were revealed, a descriptive analysis was carried out to know the characteristics of the local governments that show the highest and the lowest indexes.

The results of this research show that in 2015 governments with the highest indexes were Banten Province, Tangerang Regency, and South Tangerang City. From 2011 to 2015, the regencies that were consistently in the ten highest ranks were Tangerang Regency, Bekasi Regency, Bogor Regency, Sidoarjo Regency, South Tangerang City, Surabaya City, and Cilegon City. Meanwhile, the regencies that were in the five lowest ranks from 2011 to 2015 were Pematang Regency, Garut Regency, Sukabumi City, Tasikmalaya City and Cimahi City.

Keywords: financial condition, local government, short-term solvency, long-term solvency, budgetary solvency, operational solvency, financial flexibility, service-level solvency, financial independence.



ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA TAHUN 2011—2015

Sukeksi Hastaningrum
Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
Email: sukeksih@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara komprehensif pemerintah daerah se-Jawa tahun 2011--2015. Konsep untuk mengukur kondisi keuangan ini terdiri atas tujuh dimensi yaitu solvabilitas jangka panjang, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan. Terdapat duapuluh sembilan indikator yang membentuk dimensi kondisi keuangan. Dimensi-dimensi ini akan digabung menjadi indeks komposit kondisi keuangan (IKK) sebagai dasar pemeringkatan dan pengkategorian. Setelah diperoleh hasil pengukuran, dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah yang memiliki peringkat tertinggi dan terendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2015, peringkat tertinggi untuk masing-masing level pemerintah daerah diraih oleh Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Selama kurun waktu 2011-2015, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat tertinggi adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, dan Kota Cilegon. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota yang konsisten berada pada sepuluh peringkat terendah adalah Kabupaten Pematang Jaya, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.

Kata kunci: Kondisi keuangan, pemerintah daerah, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan.